

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Retribusi Jasa Umum (X1) dan variabel Retribusi Jasa Usaha (X2) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel Retribusi Perizinan Tertentu (X3) tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Variabel Retribusi Jasa Umum (X1) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel Retribusi Jasa Usaha (X2) dan variabel Retribusi Perizinan Tertentu (X3) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.130843 artinya bahwa 13,08 persen variabel terikat Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variabel independen Retribusi Jasa Umum (X1), Retribusi Jasa Usaha (X2) dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan 86,92 persen (100-13,08) sisanya dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

6.2 Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi terkait Pembayaran Iuran, baik itu Pajak, Retribusi Daerah atau berbagai sumber pendapatan daerah yang nantinya mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar iuran untuk membangun kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edy Suandi Hamid, 2005, *Formula Alternatif DAU* , UII Press Yogyakarta, Yogyakarta,
- Halim, Abdul, 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga Salemba Empat, Jakarta
- Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Mardiasmo, 2002 .*Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI Offset
- Rochmat Soemitro. 2008, *Asas dan Dasar PerRetribusian 1*, PT Eresco, Bandung
- Suparmoko, M. 1997. *Keuangan Negara dalam Teori Praktek*. BPFE : Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta.

Media

- Tim Redaksi Fokus Media, 2007, *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Fokusmedia. Bandung.

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*.

Undang - Undang

- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.*
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 *tentang Pendapatan Asli Daerah.*
- Undang-Undang No 58 Tahun 2005 Pasal 4 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*